

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Pelayanan Sosial “Mandiri” Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan anak terlantar dalam program rehabilitasi sosial telah diwujudkan, namun belum berjalan secara optimal karena masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, terutama defisit jumlah Pekerja Sosial dan keterbatasan anggaran. Dengan menggunakan kerangka analisis pendekatan 5P pemberdayaan masyarakat dari Edi Suharto (2014) dan dibaca melalui perspektif hak anak (*child rights perspective*), penelitian ini menemukan bahwa proses pemberdayaan di RPS Mandiri masih cenderung berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberian layanan, sehingga belum sepenuhnya menggeser posisi anak dari objek penerima layanan menjadi subjek aktif yang menentukan masa depannya sendiri. Idealitas pemberdayaan yang bersifat transformatif belum sepenuhnya tercapai karena terdapat kesenjangan yang konsisten antara desain normatif program dan realita pelaksanaan di lapangan.

Pada dimensi Pemungkinan (*enabling*), RPS Mandiri berhasil menciptakan lingkungan yang relatif aman dan rutinitas harian yang terstruktur sebagai pengganti ketidakpastian kehidupan anak sebelumnya, meskipun kenyamanan psikologis belum dirasakan merata oleh seluruh penerima manfaat. Pada dimensi Penguatan (*empowering*), perluasan akses pendidikan formal menjadi capaian paling menonjol yang dibuktikan dengan adanya prestasi akademik penerima

manfaat, sementara pelatihan keterampilan vokasional dan bimbingan psikososial masih terkendala ketidakkonsistenan jadwal dan ketergantungan pada mitra eksternal. Pada dimensi Perlindungan (*protecting*), panti telah menerapkan mekanisme penanganan konflik berbasis verifikasi dan musyawarah tanpa kekerasan fisik, tetapi sosialisasi hak kepada anak belum terstandardisasi dan masih muncul persepsi ketidakadilan. Pada dimensi Penyokongan (*supporting*), pendampingan individual berjalan atas dasar dedikasi personal Pekerja Sosial, namun intensitasnya dibatasi oleh rasio penanganan yang jauh melampaui standar ideal. Adapun dimensi Pemeliharaan (*fostering*) merupakan dimensi paling lemah, karena program bimbingan lanjut pasca-terminasi hanya berjalan atas inisiatif pribadi staf tanpa dukungan anggaran formal dan sistem yang terlembagakan.

Berkaitan dengan faktor pendorong dan penghambat, penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor pendorong utama terwujudnya pemberdayaan bersumber dari kepemimpinan visioner Kepala RPS Mandiri yang memandang anak sebagai subjek pemberdayaan, komitmen institusional terhadap lingkungan bebas kekerasan, dedikasi personal Pekerja Sosial, serta kerja sama lintas instansi dengan berbagai pihak eksternal seperti perguruan tinggi, Kementerian Agama, dan aparat keamanan. Sebaliknya, faktor penghambat yang paling fundamental adalah keterbatasan sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh defisit Pekerja Sosial dengan rasio penanganan 1:12 hingga 1:13 yang diperparah oleh pemindahan staf terlatih, keterbatasan anggaran yang berdampak pada ketidakkonsistenan program penguatan dan ketiadaan bimbingan lanjut yang terstruktur, serta belum adanya kemitraan formal untuk penyaluran kerja purna

bina. Kondisi paradoks atau ketidaksesuaian antara besarnya mandat pelayanan dan terbatasnya kapasitas aparatur inilah yang menjadi penentu sejauh mana pemberdayaan dapat diwujudkan secara bermakna.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas negara dalam menjalankan mandat kesejahteraan sosialnya melalui rehabilitasi sosial tidak cukup diukur dari terselenggaranya program semata, melainkan dari sejauh mana proses tersebut mampu memberdayakan anak untuk hidup mandiri dan berfungsi sosial secara wajar di masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperkaya penerapan pendekatan 5P Suharto sebagai instrumen analisis yang mampu memetakan secara presisi letak kekuatan dan kelemahan pemberdayaan pada setiap dimensinya, sekaligus menempatkan anak sebagai subjek pemberdayaan, bukan sekadar objek pelayanan sebagaimana banyak ditemukan dalam penelitian terdahulu yang masih berfokus pada peran lembaga atau efektivitas program. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan gambaran nyata bahwa keberhasilan pemberdayaan sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya aparatur dan keberlanjutan dukungan pasca-terminasi, sehingga dapat menjadi rujukan bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan RPS Mandiri dalam memperkuat dimensi-dimensi yang paling membutuhkan perbaikan. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pemahaman terhadap fenomena pemberdayaan anak terlantar dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*) di Indonesia dan menjadi relevan bagi pengembangan kebijakan serta praktik pelayanan sosial berbasis pemberdayaan yang lebih realistis dan berkelanjutan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan serta mengacu pada temuan lapangan, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Mengingat faktor penghambat paling fundamental adalah defisit Pekerja Sosial dengan rasio penanganan yang jauh melampaui standar ideal, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah perlu memprioritaskan penambahan jumlah Pekerja Sosial Profesional serta meninjau ulang kebijakan pemindahan staf terlatih dari panti ke dinas agar tidak memperparah kekurangan tenaga di lapangan. Selain itu, Dinas Sosial perlu mengembangkan mekanisme penganggaran yang berbasis pada asesmen kebutuhan individual anak, bukan bersifat generik, serta mengalokasikan anggaran formal khusus untuk program bimbingan lanjut (*aftercare*) agar keberlanjutan pemberdayaan pasca-terminasi tidak lagi bergantung pada inisiatif pribadi staf. Penjalinan kemitraan formal dengan perusahaan dan Balai Latihan Kerja untuk penyaluran kerja purna bina juga sebaiknya dibangun secara proaktif sejak awal, bukan menunggu adanya penerima manfaat yang telah selesai dibina.

2. Bagi Rumah pelayanan Sosial Mandiri Kota Semarang

RPS Mandiri disarankan untuk memperkuat dimensi-dimensi pemberdayaan yang masih lemah dengan melakukan beberapa langkah konkret. Pada dimensi Penguatan, perlu disusun jadwal pelatihan keterampilan vokasional dan bimbingan belajar yang reguler dan konsisten agar tidak bersifat

insidental. Pada dimensi Perlindungan, perlu dibuat prosedur sosialisasi hak dan kewajiban penerima manfaat yang terstandardisasi sejak masa orientasi, serta kebijakan distribusi uang saku yang transparan untuk menghindari persepsi ketidakadilan. Pada dimensi Penyokongan, proses asesmen dan penyusunan rencana rehabilitasi sebaiknya melibatkan anak secara aktif agar mereka memahami alasan dan tujuan penempatannya, sehingga benar-benar diposisikan sebagai subjek pemberdayaan. Kemudian pada dimensi Pemeliharaan, praktik pemantauan purna bina yang selama ini bersifat informal perlu didokumentasikan secara sistematis agar dapat menjadi basis evaluasi program yang valid.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini berfokus pada proses pemberdayaan dari perspektif penyelenggara dan penerima manfaat yang masih aktif menjalani program. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak pemberdayaan secara lebih mendalam terhadap penerima manfaat yang telah purna bina untuk menilai keberlanjutan hasil rehabilitasi dalam jangka panjang. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan dengan membandingkan praktik pemberdayaan antarpanti sejenis atau menggunakan pendekatan teoretis lain agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena pemberdayaan anak terlantar dalam rehabilitasi sosial.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Keterbatasan penelitian hanya menjangkau penyelenggara dan penerima manfaat yang masih aktif menjalani program, sehingga dampak pemberdayaan terhadap anak yang telah purna bina belum dapat diukur secara empiris.
2. Penelitian dilakukan pada satu lokasi, yaitu Rumah Pelayanan Sosial (RPS) Mandiri Kota Semarang, sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasikan ke panti sejenis lainnya.
3. Analisis hanya bertumpu pada satu kerangka teori, yaitu pendekatan 5P Edi Suharto, sehingga aspek pemberdayaan di luar kelima dimensi tersebut berpotensi tidak tertangkap.